

IMPLEMENTASI APLIKASI ITAQ TERINTEGRASI DALAM LAYANAN PENERIAMAAN PAJAK BPHTB DI KOTA PALU

Hamsia Yusup¹, Rudin.M², Muhammad Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Mengetahui dan menganalisis implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu. (3). Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pajak daerah. Secara umum, penerapan aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat Dukungan tersebut memperkuat efektivitas penerapan aplikasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan BPHTB.

Kata kunci ; Implementasi, Aplikasi Itaq dan Pajak BPHTB.

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) To determine and analyze the implementation of the ITaQ application in BPHTB services at the Palu City Revenue Agency. (2) To determine and analyze the inhibiting factors in the implementation of the ITaQ application in BPHTB services at the Palu City Revenue Agency. (3) To determine and analyze the supporting factors in the implementation of the ITaQ application in BPHTB services at the Palu City Revenue Agency. This research is a qualitative study with four informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude: (1) The implementation of the ITaQ application in BPHTB services at the Palu City Revenue Agency is a strategic step in supporting the digitalization of public services and improving the quality of regional tax governance. In general, the application can increase efficiency, accelerate administrative processes, and encourage transparency and accountability in services. Although various obstacles remain in its implementation, such as limited infrastructure, human resource readiness, and community digital literacy, this support strengthens the effectiveness of the application's implementation in improving the efficiency, transparency, and quality of BPHTB services.

Keywords; *Implementation, Application of Itaq and BPHTB Tax.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kini dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, efisien, dan berbasis digital. Salah satu bentuk perwujudan modernisasi pelayanan publik adalah melalui implementasi sistem aplikasi digital yang terintegrasi dalam pengelolaan pajak daerah.¹

¹ Fatmawati, D. (2025). Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhutang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 11(1), 68-97.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Palu, pajak daerah menjadi tulang punggung pembiayaan operasional dan pengembangan infrastruktur publik. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak ini dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak, dan memiliki nilai transaksi yang tinggi dalam setiap proses peralihan hak.²

Pada praktiknya, pengelolaan dan pelayanan BPHTB masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah proses administrasi yang berbelit-belit, lamanya waktu pelayanan, potensi manipulasi data, serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengambil inisiatif untuk menerapkan sistem digital berbasis aplikasi yang terintegrasi, yaitu ITaQ (Integrasi Transaksi dan Administrasi Qanun).

Aplikasi ITaQ dikembangkan sebagai solusi untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, memperkecil potensi kebocoran pajak, serta menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem ini, pelayanan BPHTB dapat dilakukan secara digital mulai dari input data, validasi, perhitungan, hingga pembayaran dan pelaporan pajak. Aplikasi ini

² Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkececwara).

juga diharapkan dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak, yang selama ini rawan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan etika pelayanan publik. Implementasi aplikasi ITaQ di Kota Palu merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam konteks itu, sistem pelayanan digital seperti ITaQ merupakan pilar utama untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.³

Meski secara konsep aplikasi ini sudah dirancang dengan baik, namun keberhasilan implementasinya di lapangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan manajemen perubahan organisasi menjadi kunci sukses integrasi sistem ini. Sementara itu, faktor eksternal seperti tingkat literasi digital masyarakat, dukungan regulasi, dan penerimaan pengguna juga tak kalah pentingnya dalam menentukan efektivitas penerapan aplikasi ini. Secara teoritis, keberhasilan implementasi suatu sistem digital dalam pelayanan publik dapat dianalisis melalui pendekatan model implementasi kebijakan serta model penerimaan teknologi. Model ini menekankan bahwa keberhasilan penggunaan sistem teknologi informasi sangat

³ Fatmawati, D. (2025). Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhutang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 11(1), 68-97.

dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dari penggunaan

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ITaQ telah diimplementasikan secara optimal dalam layanan BPHTB di Kota Palu. Penelitian ini juga akan menggali berbagai hambatan dan dukungan yang ada dalam proses pelaksanaannya serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan pajak daerah. Sebagai kota yang terus berkembang, Palu memerlukan sistem pelayanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat. Dengan menerapkan sistem digital seperti ITaQ, diharapkan pelayanan pajak dapat dilakukan tanpa hambatan teknis yang berarti, serta mampu mempercepat proses birokrasi yang sebelumnya dikenal lamban. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, implementasi sistem harus melalui tahapan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan.⁴

Penelitian ini akan memberikan gambaran teknis mengenai implementasi ITaQ, juga menilai secara kualitatif pengalaman pengguna, efisiensi layanan, serta kontribusinya terhadap peningkatan PAD dari sektor BPHTB. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam pengelolaan sistem layanan publik berbasis teknologi.

Transformasi digital dalam sektor pajak daerah tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan

⁴ Tamy, F. R. (2025). Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 211-228.

pola pikir, tata kelola, dan budaya pelayanan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, untuk memahami manfaat dari sistem digital yang diimplementasikan dan bersama-sama menciptakan lingkungan pelayanan yang modern, transparan, dan partisipatif. Penelitian ini mengambil fokus pada konteks implementasi aplikasi ITaQ secara spesifik dalam pelayanan BPHTB di Kota Palu.

Berdasarkan penelitian awal di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa fenomena atau permasalahan dalam pemakaian aplikasi aplikasi ITaQ yaitu ; (a) Kendala Teknis seperti Jaringan yang tidak stabil, server down. (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia seperti ; Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan ITaQ oleh pegawai daerah dapat menjadi penghambat. (c) Koordinasi Antar-OPD misalnya : Kurangnya koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penggunaan ITaQ dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan informasi. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Implementasi Aplikasi Itaq Terintegrasi Dalam Layanan Penerimaan Pajak BPHTB Di Badan Penddaatan Daerah Kota Palu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu ?
2. Apa faktor penghambat implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak

⁵ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶ Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat fenomena menarik mengenai penerimaan Pajak BPHTB melalui aplikasi ITAQ.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palu

Sejarah suatu kota yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu. Kota ini dihuni oleh sebuah suku yaitu Kaili. Palu yang berada tepat ditengah-tengah pulau Sulawesi, di huni oleh banyak suku dari berbagai daerah di sekitarnya. Suku asli yang lama tinggal memiliki sejarah berdasarkan penelusuran tempo dulu. Peradaban orang-orang kaili yang mendiami kota Palu terletak di pegunungan yang mengintari laut Kaili (saat itu kata Palu belum digunakan, karena lembah Palu masih berupa lautan) yang terdiri dari beberapa Kerajaan lokal. To-Kaili juga terdiri dari beberapa subetnik Kaili diantaranya To-Sigi, To-Biromaru, To-Banawa, To-Dolo, To-Kulawi, To-Banggakoro, To-Bangga, To-Pakuli, To-Sibalaya, To-Tavaili, To-Parigi, To-Kulavi dan masih banyak lagi subetnis Kaili lainnya. To-Kaili mendiami hampir seluruh seluruh Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kab. Parigi Mautong.

⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

To-Kaili juga mempunyai beberapa dialek diantaranya dialek Ledo, Rai, Tara, Ija, Edo/Ado, Unde, dan lain-lain. Dari semua dialek yang ada, dialek Ledo merupakan dialek yang umum di gunakan. Semua dialek Kaili merupakan dialek yang dibedakan dengan kata “sangkal”, karena semua jenis dialek Kaili mengandung pengertian “tidak”. Kaili sendiri konon katanya diambil dari satu jenis pohon yang bernama Kaili (saat ini sudah punah) sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi yang menjadi penanda daratan bagi orang-orang yang memasuki teluk Kaili (teluk Palu dulu bernama teluk Kaili). Pohon Kaili ini diperkirakan terletak diantara Kalinjo (sebelah timur Ngata Baru) dan Sigimpu (sebelah Tenggara desa Bora). ditengarai pohon ini terletak di Ngata Kaili (sebuah kampung yang terletak di sebelah selatan Paneki, saat ini masih didiami oleh masyarakat etnik Kaili).

Sejarah Kota Palu dan Suku Kaili dalam sejarah La Galigo tercatat satu riwayat Sawerigading, yang pernah menginjakan kakinya di tanah Kaili, peristiwa ini terjadi sekitar abad 8-9 M. Cerita tentang Sawerigading sangat populer di masyarakat Bugis dan juga masyarakat Kaili. Peristiwa ini juga merupakan cikal bakal terjalinnya hubungan dagang antara Kerajaan-Kerajaan di Tanah Kaili khususnya Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi.⁷ Teluk Kaili dahulu sangat luas yang tepi pantai sebelah barat berada di Desa Bangga, di sebelah timur sampai ke Desa Bora dan mengintari Desa Loru. Bisa di bayangkan seperti apa lembah Palu pada saat itu.

⁷ Tamy, F. R. (2025). Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 211-228.

proses surutnya laut teluk Kaili diperkirakan terjadi sebelum Abad 16, sebab pada Abad 16 sudah ada Kerajaan Palu.

Pada Abad 16 dalam Aksara Lontara telah disebutkan satu Kerajaan di tanah Kaili yang bernama Kerajaan Palu. Para intelektual belada pada Abad 18 telah menggunakan kata Palu untuk menunjuk daerah lembah Kaili. Patut ditelusuri kapan tepatnya penggunaan kata Palu untuk Kota Palu sebab hal ini dapat mengungkap tabir peradaban masyarakat Kaili. Sayangnya, masyarakat Kaili tidak menganut budaya tulis, melainkan budaya lisan. Hal ini disebabkan karena orang Kaili mempunyai satu filosofi bahwa tubuh adalah dunia yang kecil, dan apapun yang terjadi di dunia merupakan kejadian dalam diri. Dengan kata lain tubuh adalah rangkaian catatan-catatan yang terus mengalir dari waktu ke waktu.

Pengertian Kaili secara lebih merujuk kepada tubuh, tempat mengalirnya darah. No -Kaili = mengalir, dari hulu ke hilir memberi kehidupan dan pengalaman baru kepada apapun yang dilaluinya. Dari semua peradaban to-Kaili yang coba diungkap disini masih ada lagi satu peradaban yang ditengarai juga sangat tua yaitu peradaban Lando, yaitu peradaban to-Kaili yang terletak diantara raranggonau dan tompu, dan ada satu Kerajaan Kaili tertua yang bernama Kerajaan Sidima yang terletak di Negeri Kalinjo (sebelah timur Tompu). Namun, kurangnya literatur menyebabkan pembahasan ini belum dapat di publikasikan.

Palu merupakan “Kota Baru” yang letaknya di muara sungai. Dr. Kruyt menguraikan bahwa Palu sebenarnya tempat baru dihuni orang (De Aste Toradja’s van Midden Celebes). Awal mula pembentukan Kota Palu berasal dari penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo. Setelah pergeseran penduduk ke dataran rendah,

akhirnya mereka sampai suatu tempat yang sekarang ini disebut Boya Pogego. Kota Palu bermula dari kesatuan empat kampung, yaitu : Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang bernama Kamonji, Panggovia sekarang bernama Lere, Boyantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat yang disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.

1. Analsis implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu

Implementasi aplikasi ITaQ (Integrated Tax Application and Query) dalam pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Kota Palu merupakan bagian dari transformasi digital sektor perpajakan daerah. Transformasi ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.⁸

BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki karakteristik pelayanan yang melibatkan banyak pihak, antara lain wajib pajak, notaris/PPAT, serta instansi pertanahan. Sebelum implementasi ITaQ, proses administrasi BPHTB cenderung dilakukan secara manual, memerlukan waktu

⁸ Supriyadi, S. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berbasis Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

relatif lama, serta rentan terhadap kesalahan input data dan potensi praktik maladministrasi.

Melalui ITaQ, sistem pelayanan BPHTB diintegrasikan dalam satu platform digital yang memungkinkan pendaftaran, pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), verifikasi, hingga validasi dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, implementasi ITaQ menjadi instrumen penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Kota Palu.⁹ Untuk menganalisis implementasi ITaQ, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang menekankan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi ITaQ mencakup penyampaian informasi kebijakan kepada aparatur dan para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi aplikasi ITaQ telah dilakukan melalui rapat internal, pelatihan teknis, serta pemberitahuan kepada notaris/PPAT. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam hal pemahaman teknis pengguna, terutama bagi wajib pajak yang kurang familiar dengan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disampaikan, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal.

Komunikasi yang efektif seharusnya tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membuka ruang umpan balik (feedback). Dalam konteks ini, mekanisme pengaduan dan konsultasi perlu diperkuat agar setiap kendala teknis dapat segera ditangani.

⁹ Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan berbasis teknologi. Implementasi ITaQ memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi serta pemahaman regulasi perpajakan daerah. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga IT yang secara khusus menangani pemeliharaan sistem. Akibatnya, ketika terjadi gangguan teknis, proses pelayanan dapat terhambat.¹⁰ Selain SDM, sumber daya infrastruktur seperti jaringan internet, server, dan perangkat komputer juga berpengaruh signifikan. Stabilitas jaringan menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika terjadi lonjakan akses pada waktu tertentu.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi ITaQ. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum aparaturnya Badan Pendapatan Kota Palu menunjukkan sikap positif terhadap digitalisasi pelayanan. Mereka menyadari bahwa sistem elektronik dapat mempercepat proses kerja dan meminimalkan kesalahan administrasi. Namun, dalam tahap awal implementasi, terdapat resistensi dari sebagian pegawai yang terbiasa dengan sistem manual. Resistensi ini lebih disebabkan oleh faktor kebiasaan dan kekhawatiran terhadap perubahan pola kerja.

¹⁰ Tarigan, G. A., Liem, J. M., Shebubakar, M. S. A. R., & Cahaya, M. (2025). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6 (2), 550-566.

Seiring berjalannya waktu, melalui pendampingan dan pelatihan, resistensi tersebut berangsur berkurang.¹¹

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas mendukung kelancaran implementasi. Dalam pelaksanaan ITaQ, telah ditetapkan pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur, mulai dari operator input data, verifikator, hingga pejabat penandatanganan validasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan BPHTB juga telah disesuaikan dengan sistem elektronik. Dengan adanya SOP yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih sistematis dan terukur.

a. Dampak Implementasi ITaQ terhadap Pelayanan BPHTB

1. Peningkatan Efisiensi Pelayanan

Salah satu dampak signifikan implementasi ITaQ adalah meningkatnya efisiensi pelayanan. Waktu penyelesaian proses validasi BPHTB menjadi lebih singkat dibandingkan sistem manual. Pengurangan penggunaan dokumen fisik juga menekan biaya operasional. Efisiensi ini tidak hanya dirasakan oleh aparat, tetapi juga oleh wajib pajak dan notaris/PPAT yang dapat mengakses sistem secara daring tanpa harus datang berulang kali ke kantor Badan Pendapatan Kota Palu.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Digitalisasi melalui ITaQ meningkatkan transparansi karena setiap tahapan proses tercatat dalam sistem. Jejak digital (digital trace) memudahkan pengawasan dan audit internal. Dengan sistem yang terintegrasi, peluang terjadinya praktik penyimpangan dapat

¹¹ Widyawati, C. R. S. W., Lukman, A., & Anggriani, J. (2025). Kajian Penerapan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Menjadi Akta Jual Beli. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

diminimalkan. Hal ini memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudahan akses dan kejelasan informasi dalam aplikasi ITaQ turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang transparan dan prosedur yang jelas memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi kesalahan perhitungan.

b. Upaya Optimalisasi Implementasi ITaQ

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen tenaga IT profesional.

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi, termasuk peningkatan kapasitas server dan jaringan.
2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak, agar lebih memahami penggunaan aplikasi.
3. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Secara Berkala, guna menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan regulasi.¹²

Optimalisasi ini penting agar implementasi ITaQ tidak hanya berhenti pada tahap digitalisasi administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Analisis Keterkaitan Implementasi ITaQ dengan Good Governance
Implementasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB mencerminkan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparansi, akuntabilitas,

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

efektivitas, dan efisiensi. Digitalisasi pelayanan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Selain itu, sistem elektronik mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Data transaksi BPHTB yang tersimpan dalam sistem dapat dianalisis untuk perencanaan peningkatan PAD serta evaluasi kebijakan perpajakan daerah. Dengan demikian, ITaQ tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan organisatoris.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Dampak positif yang dihasilkan meliputi peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, untuk mencapai implementasi yang optimal, diperlukan komitmen berkelanjutan dalam pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur teknologi.

e. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan dalam konteks digitalisasi pelayanan publik. Keempat variabel utama terbukti memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem berbasis teknologi informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat

menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Kota Palu dalam menyempurnakan pelaksanaan ITaQ, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengembangkan sistem pelayanan pajak berbasis elektronik. Implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu merupakan langkah progresif dalam reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi perpajakan daerah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.¹³ Keberlanjutan dan keberhasilan implementasi ITaQ sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, sumber daya, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, ITaQ berpotensi menjadi model inovasi pelayanan pajak daerah yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi Itaq Dalam Pelayanan Bphtb Di Badan Pendapatan Kota Palu

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat. Badan Pendapatan Kota Palu sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), turut mengadopsi inovasi berbasis teknologi melalui implementasi aplikasi ITaQ. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi, mempercepat verifikasi, serta

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

meminimalisasi kesalahan manual dalam pengelolaan data pajak. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi ITaQ tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Berbagai faktor, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun kultural, menjadi penghambat optimalisasi sistem tersebut dalam mendukung pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu.¹⁴

1. Hambatan Infrastruktur dan Sarana Teknologi

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi ITaQ adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Sistem berbasis aplikasi digital sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet dan ketersediaan perangkat keras yang memadai. Apabila jaringan internet mengalami gangguan atau tidak stabil, maka proses input, verifikasi, hingga penerbitan dokumen menjadi terhambat. Hal ini berdampak langsung pada waktu pelayanan yang menjadi lebih lama dibandingkan dengan yang direncanakan. Selain itu, spesifikasi komputer atau server yang kurang memadai juga dapat menyebabkan aplikasi berjalan lambat, mengalami error, atau bahkan crash pada saat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kinerja pegawai, tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah integrasi data antar sistem. Pelayanan BPHTB membutuhkan sinkronisasi data dengan instansi lain, seperti data pertanahan dan data kependudukan. Apabila sistem ITaQ belum sepenuhnya

¹⁴ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

terintegrasi atau masih sering terjadi perbedaan data antar basis informasi, maka proses validasi menjadi lebih rumit dan memerlukan pengecekan manual tambahan. Akibatnya, tujuan utama digitalisasi untuk mempercepat pelayanan menjadi kurang tercapai.

2.Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan dalam implementasi aplikasi ITaQ. Transformasi digital menuntut kemampuan baru dari aparatur, khususnya dalam pengoperasian sistem, pemecahan masalah teknis, serta adaptasi terhadap perubahan prosedur kerja. Tidak semua pegawai memiliki tingkat literasi digital yang sama. Sebagian pegawai mungkin masih terbiasa dengan pola kerja manual dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem berbasis aplikasi. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan juga dapat menyebabkan pemahaman terhadap fitur dan fungsi aplikasi tidak maksimal.¹⁵

Di sisi lain, kemampuan teknis untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem sering kali masih bergantung pada tenaga tertentu atau pihak ketiga. Jika terjadi gangguan teknis yang membutuhkan penanganan khusus, pelayanan bisa terhenti sementara menunggu perbaikan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kapasitas internal organisasi dalam mengelola teknologi belum sepenuhnya mandiri.¹⁶

¹⁵ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900

¹⁶ Septiani, A. D., & Nur, M. (2025). Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Takalar. *Center of Economic Students Journal*, 8(2), 506-513.

3. Literasi Digital dan Kesiapan Masyarakat

Selain faktor internal organisasi, hambatan juga muncul dari sisi pengguna layanan, yaitu masyarakat wajib pajak. Implementasi aplikasi ITaQ menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam menginput data atau mengunggah dokumen secara mandiri. Namun tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan atau akses teknologi yang memadai. Sebagian masyarakat mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi digital atau merasa kesulitan memahami prosedur yang tersedia dalam sistem.

Keterbatasan literasi digital ini sering menyebabkan masyarakat tetap memilih datang langsung ke kantor pelayanan untuk mendapatkan bantuan petugas. Akibatnya, beban kerja pegawai tidak berkurang secara signifikan meskipun aplikasi sudah tersedia. Bahkan dalam beberapa kasus, petugas harus membantu masyarakat mengoperasikan aplikasi di tempat, sehingga efektivitas digitalisasi menjadi kurang optimal.

4. Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi aplikasi digital sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jika informasi mengenai keberadaan, manfaat, serta tata cara penggunaan ITaQ tidak disampaikan secara luas dan sistematis, maka tingkat pemanfaatannya akan rendah. Sosialisasi yang kurang intensif dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami perubahan prosedur atau bahkan tidak mengetahui bahwa layanan telah tersedia secara digital.

Selain itu, komunikasi internal antar pegawai juga memegang peranan penting. Apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai prosedur atau kebijakan penggunaan aplikasi, maka pelayanan

menjadi tidak seragam. Konsistensi dalam penerapan kebijakan sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh pengalaman layanan yang jelas dan tidak membingungkan.¹⁷

5. Aspek Regulasi dan Standar Operasional

Hambatan lain dalam implementasi ITaQ berkaitan dengan aspek regulasi dan standar operasional prosedur. Digitalisasi pelayanan memerlukan dasar hukum yang jelas agar memiliki legitimasi dalam pelaksanaannya. Apabila regulasi daerah belum sepenuhnya mengatur mekanisme layanan berbasis elektronik, maka terdapat potensi keraguan dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Standar operasional prosedur yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan sistem digital juga dapat menjadi kendala. Prosedur manual yang masih dipertahankan berdampingan dengan sistem elektronik dapat menimbulkan duplikasi pekerjaan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan baik bagi pegawai maupun masyarakat.

6. Budaya Organisasi dan Resistensi Perubahan

Perubahan dari sistem manual ke sistem digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja. Sebagian pegawai mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena merasa nyaman dengan sistem lama atau khawatir terhadap peningkatan beban kerja. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk kurangnya inisiatif untuk mempelajari aplikasi secara mendalam atau kecenderungan kembali pada prosedur manual ketika menghadapi kendala teknis.

¹⁷ Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.

Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi juga dapat memperlambat proses transformasi. Implementasi teknologi memerlukan komitmen bersama dan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong perubahan. Tanpa dukungan penuh dari pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian, penerapan aplikasi cenderung berjalan setengah hati.¹⁸

7. Koordinasi Antar Instansi

Pelayanan BPHTB melibatkan koordinasi dengan instansi lain, seperti kantor pertanahan dan lembaga terkait lainnya. Ketidaksinkronan data atau keterlambatan konfirmasi dari instansi lain dapat menghambat proses yang sudah dimulai melalui aplikasi ITaQ. Walaupun sistem di Badan Pendapatan Kota Palu sudah berbasis digital, apabila mitra kerja belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik, maka sebagian tahapan tetap memerlukan verifikasi manual. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan tidak dapat berdiri sendiri dalam satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi sistem yang lebih luas.

8. Keamanan Data dan Kepercayaan Publik

Faktor keamanan data juga menjadi perhatian dalam implementasi aplikasi ITaQ. Pelayanan BPHTB melibatkan data pribadi dan informasi nilai transaksi yang bersifat sensitif. Jika masyarakat meragukan keamanan sistem atau khawatir akan kebocoran data, maka tingkat kepercayaan terhadap aplikasi akan menurun. Persepsi terhadap keamanan sistem sangat memengaruhi kemauan

¹⁸ Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkececwara).

masyarakat untuk beralih dari layanan manual ke layanan digital. Di sisi lain, apabila sistem pernah mengalami gangguan atau kesalahan yang berdampak pada data wajib pajak, maka citra pelayanan dapat menurun. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan dan transparansi dalam penanganan gangguan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

9. Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Implementasi aplikasi ITaQ tidak berhenti pada tahap peluncuran, melainkan memerlukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Hambatan sering muncul ketika sistem tidak diperbarui sesuai kebutuhan pengguna atau tidak ada mekanisme umpan balik yang efektif. Tanpa evaluasi rutin, kelemahan sistem akan terus berulang dan menimbulkan ketidakpuasan. Pengembangan fitur yang tidak sesuai kebutuhan lapangan juga dapat membuat aplikasi kurang relevan. Oleh karena itu, penting bagi Badan Pendapatan Kota Palu untuk secara berkala menilai kinerja aplikasi, menampung masukan dari pegawai dan masyarakat, serta melakukan perbaikan teknis maupun prosedural secara konsisten.

Secara keseluruhan, faktor penghambat implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi, kendala regulasi, resistensi budaya organisasi, lemahnya koordinasi antar instansi, serta isu keamanan data dan evaluasi sistem. Keberhasilan implementasi aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan masyarakat dalam menerima perubahan. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan agar ITaQ benar-benar dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPHTB dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah di Kota Palu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Supriyadi, (2025). Rekonstruksi Regulasi Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berbasis Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa masih ada ketidaktegasan peraturan hukum dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB, serta keterlibatan atau involvement – ada intervensi adalah kondisi yang memungkinkan suatu pihak diikutsertakan terhadap suatu kegiatan. Pihak yang satu (pemerintah) lebih berperan dari pihak yang lain (wajib pajak).

E. KEIMPULAN

1. Implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pajak daerah. Secara umum, penerapan aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat, keberadaan faktor pendukung seperti komitmen pimpinan, dukungan regulasi, serta pengembangan

sistem yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dengan penguatan pada aspek teknis dan nonteknis secara konsisten, aplikasi ITaQ berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mengoptimalkan pelayanan BPHTB dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Palu.

2. Faktor penghambat implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu dipengaruhi oleh kendala infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya stabil, keterbatasan kapasitas dan adaptasi sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, kurang optimalnya sosialisasi, serta koordinasi dan integrasi sistem antarinstansi yang belum berjalan maksimal. Hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas dan pemanfaatan aplikasi dalam mendukung pelayanan BPHTB secara menyeluruh.

F. SARAN

Berikut saran implementasi aplikasi ITaQ dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Kota Palu sebagai berikut :

1. Integrasi Sistem
 - a. Integrasikan ITaQ dengan sistem BPHTB, BPN, dan Disdukcapil untuk validasi otomatis data wajib pajak dan objek pajak.
 - b. Sinkronisasi dengan sistem pembayaran (bank/QRIS) untuk monitoring real-time.
2. Digitalisasi Proses Layanan
 - a. Pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan bukti bayar dilakukan secara online.

- b. Fitur upload dokumen dan tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses.
- 3. Transparansi & Tracking
 - a. Sediakan fitur pelacakan status permohonan secara mandiri oleh wajib pajak.
 - b. Notifikasi otomatis (SMS/Email/WhatsApp) terkait tahapan proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit
- Azkiya Publishing Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinagging Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6 (1), 271-285.
- Fatmawati, D. (2025). Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhutang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 11(1), 68-97.

- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126-132.
- Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkucecwara).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance. from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674
- Septiani, A. D., & Nur, M. (2025). Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Takalar. *Center of Economic Students Journal*, 8(2), 506-513.

- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, S. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berbasis Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.
- Tamy, F. R. (2025). Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 211- 228.
- Tarigan, G. A., Liem, J. M., Shebubakar, M. S. A. R., & Cahaya, M. (2025). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 550-. 566.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta: Sekretaris Negera Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Widyawati, C. R. S. W., Lukman, A., & Anggriani, J. (2025). Kajian Penerapan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Menjadi Akta Jual Beli. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).